



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
[www.badilum.mahkamahagung.go.id](http://www.badilum.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1775/DJU/RA1.7/VIII/2024 Jakarta, 28 Agustus 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pergeseran Anggaran Program  
Penegakan dan Pelayanan Hukum  
DIPA 03 TA. 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri

Di  
Tempat

Mengingat rendahnya realisasi penyerapan anggaran Satker Program Penegakan dan Pelayanan Hukum DIPA 03 TA. 2024, kami akan melakukan pergeseran anggaran khususnya satker yang penyerapannya masih di bawah 50 % untuk anggaran Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA) per 31 Juli 2024, untuk memenuhi kebutuhan anggaran satker yang membutuhkan penambahan anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum DIPA 03 TA. 2024 sesuai dengan PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan Keuangan.

Berikut Satker dan besaran anggaran yang akan dilakukan pergeseran anggaran :

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Anggaran yang ditarik	Sisa Pagu
1	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	634.900.000	70.000.000	564.900.000
2	PENGADILAN TINGGI AMBON	264.680.000	30.000.000	234.680.000
3	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	256.240.000	30.000.000	226.240.000
4	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	271.460.000	38.585.000	232.875.000
5	PENGADILAN NEGERI WAMENA	55.500.000	5.000.000	50.500.000
6	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	173.200.000	5.000.000	168.200.000
7	PENGADILAN NEGERI SANANA	256.090.000	5.000.000	251.090.000
8	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	107.940.000	20.000.000	87.940.000

9	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	413.700.000	25.000.000	388.700.000
10	PENGADILAN NEGERI MATARAM	465.029.000	50.000.000	415.029.000
11	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	525.878.000	50.000.000	475.878.000
12	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	337.423.000	40.000.000	297.423.000
13	PENGADILAN NEGERI TERNATE	566.712.000	25.000.000	541.712.000
14	PENGADILAN NEGERI SELONG	162.750.000	20.000.000	142.750.000
15	PENGADILAN NEGERI TUBAN	224.500.000	20.000.000	204.500.000
16	PENGADILAN NEGERI TONDANO	183.310.000	20.000.000	163.310.000
17	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	257.500.000	30.000.000	227.500.000
18	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	725.631.000	50.000.000	675.631.000
19	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	243.370.000	25.000.000	218.370.000
20	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	786.485.000	70.000.000	716.485.000
21	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	206.180.000	20.000.000	186.180.000
22	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	855.600.000	25.000.000	830.600.000
23	PENGADILAN NEGERI MANADO	421.310.000	25.000.000	396.310.000
24	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	246.840.000	20.000.000	226.840.000
25	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	375.650.000	40.000.000	335.650.000
26	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	345.399.000	45.000.000	300.399.000
27	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	569.720.000	20.000.000	549.720.000
28	PENGADILAN NEGERI MALILI	116.809.000	15.000.000	101.809.000
29	PENGADILAN NEGERI NGAWI	140.360.000	15.000.000	125.360.000
30	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	306.272.000	15.000.000	291.272.000
31	PENGADILAN NEGERI PALOPO	141.956.000	10.000.000	131.956.000
32	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	162.950.000	20.000.000	142.950.000
33	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	145.016.000	15.000.000	130.016.000
34	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	142.340.000	10.000.000	132.340.000
35	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	371.519.000	25.000.000	346.519.000
36	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	141.400.000	15.000.000	126.400.000

37	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	300.054.000	10.000.000	290.054.000
Jumlah		10.474.393.000	973.585.000	9.669.393.000

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran yang dilakukan pergeseran adalah anggaran untuk penyelesaian perkara di KRO 1049.BCA (Perkara Hukum Perseorangan) dengan MAK : 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa), 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 521211 (Belanja Bahan), 521114 (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat),
2. Pergeseran anggaran dapat menyebabkan perubahan target volume perkara
3. Satker mengirimkan matrik pergeseran anggaran semula - menjadi paling lambat tanggal 2 September 2024 ke [anggaranbadilum2@gmail.com](mailto:anggaranbadilum2@gmail.com)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



**Bambang Myanto**